

PARTISIPASI POLITIK TUANKU TAREKAT SYATTARIYAH DALAM PARTAI NASIONALIS DI PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT¹

Sadri Chaniago², Nidzam Sulaiman³

sadrichaniago@gmail.com
nizamm01@ukm.my

ABSTRAK

The concept of political spectrum (*politik aliran*) as a clarification to partisanship in Indonesia, believes, there are strong relations among individual with a religious orientation to choose their political party. Moslem of santri tends to accompany Islamic party. Meanwhile, Moslem of abangan has a tendency to nationalist party (secular). Political participation of tuanku of Shatariyyah tarekat in political party at Padang Pariaman, West Sumatra, Indonesia, showing they are more inclined to choose nationalist party rather than Islamic party as political participation bases. This study identifies their tendencies to join the nationalist party. Thus, this study uses methodology of qualitative with field form of research. Primary data obtained through in-depth interview and observation. Research informant was tuanku of Shatariyyah tarekat, who became the official member of nationalist party at Padang Pariaman, triangulated with other informant. Informant selected through snow ball sampling. Secondary data obtained through research library. Nevertheless, this study finds the reason why tuanku of Shatariyyah tarekat more in favor of nationalist party as political participation bases, because a difference of ism among Islam modernist and Islam traditionalist, more safe and feel to be esteemed in nationalist party, pragmatic and opportunist in activities of politics. Their political participation had several function, pursuing need of economics, gratifying adjustment of social, pursuing special values, and fulfill need of subconscious and also certain psychology. Difference of ism among Islam tradisional with Islam modenis has influenced tuanku of Shatariyyah tarekat in determining political participation party bases. Their political participation shows a fading political spectrum in elite level of tarekat Shatariyyah in Padang Pariaman. They are more comprehending politics in rational perspective in pursuit of their social and economic, so that has come to rational pragmatic in political participation. This matter represent indication goes into effect of political desacralization amongst them, thus which become religion pragmatic human being in their political behavior.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang banyak terdapat penganut Tarekat Syattariyah. Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syattariyah di kawasan ini “melebihi 100,000 orang” (*Tempo*, 19 Januari 1980). Sedangkan ditinjau dari jumlah komposisi penduduk, menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syattariyah (sebagai tradisional Islam)⁴ di

¹ Makalah yang dipresentasikan dalam “*International Conference on Islam in the Malay World*,” Bandung, Indonesia, 20-22 November 2011. Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (PPs UIN SGD) bekerjasama dengan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) Malaysia.

² Pengajar tetap pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

³ *Senior Fellow* pada Institut Penelitian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia.

⁴ Tradisionalis Islam dipahami sebagai kelompok yang biasanya mengaku sebagai pengikut salah satu mazhab dalam Islam yang sering menghubungkan amalan keislamannya dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Selain dari itu, mereka merujuk *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas*, sebagai sumber dalam dalam mengamalkan Islam. Tradisi kelompok tradisional Islam yang mengikuti salah satu mazhab dalam Islam juga menggunakan *ijma'* ulama sebagai salah satu dari sumber hukum membuat mereka secara terus

Padang Pariaman diperkirakan dalam jumlah 50% dari kasuseluruhan penduduk kawasan ini. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

Banyaknya penganut tarekat Syattariyah⁵ di Padang Pariaman dapat dimaklumi, karena *nagari*⁶ (negeri) Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bekas “pusat pengembangan Islam dan tarekat Syattariyah pertama di Minangkabau (Sumatera Barat), yang dikembangkan oleh Syeikh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syeikh Abdurrauf al-Sinkili” (Fathurrahman, 2004: 165). Sehingga dengan demikian, tarekat Syattariyah telah menjadi tarekat yang paling awal berkembang, dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat di Padang Pariaman. Tarekat Syattariyah juga pernah menjadi satu-satunya representasi Islam tradisional di Sumatera Barat sebelum kemunculan tarekat *Naqshabandiyah* sekitar tahun 1850 M (Fathurrahman, 2003: 70-71).

Sampai sekarang pun, keberadaan pengikut tarekat Syattariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam amalan keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penetapan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Metode Fitri melalui metode “*maniliak bulan*”⁷ (*rukayah*) (Malalak, 2009), tradisi menggunakan bahasa Arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (*Antara Sumbar*, 21 September 2009). Mereka juga masih mengamalkan tradisi *basapa* (bersyafar)⁸ ke makam Syeikh Burhanuddin di Ulakan (*Harian Singgalang*, 08 Februari 2009).

Semua aktifitas ibadah jemaah tarekat Syattariyah ini dipimpin oleh *tuanku*⁹, yaitu ulama tradisional tarekat Syattariyah dalam konteks lokal Padang Pariaman. Sebagaimana lazimnya tradisi dalam tarekat, *tuanku* merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan yang penting” sebagai

menerus merujuk kepada karya-karya ulama *salaf* dalam mengambil keputusan hukum (*istinbat*) (Turmudi, 2004: 275-276).

⁵ Tarekat Syattariyah dikembangkan oleh Syeikh °Abd Allah al-Shattar di India (w.890 H/1485 M) (Fathurrahman, 2004: 153-155). Tarekat Syattariyah merupakan salah satu tarekat terpenting dalam Islamisasi di dunia Melayu-Indonesia, yang dikembangkan oleh Syeikh Abdurrauf al-Singkili (Fathurrahman, 2004: 152-153), pada sekitar tahun 1661 M (Fathurrahman, 2003: 34). Di Minangkabau (Sumatera Barat), tarekat Syattariyah dikembangkan oleh Syeikh Burhanuddin pada akhir abad ke-17, dengan berpusat di Ulakan, Padang Pariaman (Fathurrahman, 2003: 164).

⁶ *Nagari* (negeri) adalah unit kesatuan politik dan budaya yang terendah dalam sistem politik masyarakat adat Minangkabau, yang biasanya membawahi beberapa *korong* (kampung). Di era oto daerah, *nagari* merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem administrasi pemerintahan di Sumatera Barat.

⁷ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan mata, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang moderen.

⁸ Tradisi menziarahi makam Syeikh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*. Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota tarekat Syattariyah dari seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang tarekat Syattariyah.

⁹ *Tuanku* ialah ulama tradisional di Padang Pariaman Sumatera Barat, yang menamatkan pengajiannya di pondok pesantren tradisional/surau (*Salafiyah*). Ia merupakan pemimpin dan guru dalam tarekat Syattariyah.

pemimpin kerohanian dalam tarekat Syattariyah (Atjeh, 1980: 62). Mereka juga memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat Syattariyah, sebagai tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “pemimpin, sekaligus guru” (Dobbin, 1974: 326). Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan (Pramono dan Bahren, 2009: 105).

Walaupun berbagai kalangan beranggapan bahwa kaum tarekat¹⁰ merupakan kelompok yang *zuhud* dan cenderung menjauhi kehidupan dunia, namun di Padang Pariaman *tuanku* tarekat Syattariyah cenderung menafikan anggapan di atas. Mereka terlihat selalu bersentuhan dengan penguasa dan pelaku dunia politik praktis. Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari sering terlihat para menteri, panglima TNI, Tokoh politik, pemimpin partai, datang mengunjungi para *tuanku* di surau atau pondok pesantrennya.

Di antara fakta mengenai hal di atas misalnya dapat dilihat pada kasus Buya Zubir *Tuanku* Kuniang. Ia merupakan seorang ulama *senior* tarekat Syattariyah di Padang Pariaman, yang terkenal memiliki banyak pengikut dan cukup berpengaruh dalam konteks politik lokal. Ia sering menerima kunjungan pejabat pemerintahan dan pimpinan militer seperti: Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (KASAD TNI), Kepala Pusat Kebijakan Militer Tentara Nasional Indonesia (KAPUSPOM TNI), Ketua umum partai, Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman, dan sebagainya (Armaid Tanjung, 2007: 49). Fakta ini merupakan suatu pertanda bahwa *tuanku* tarekat Syattariyah, “merupakan ulama tradisional yang memegang peranan penting dan sering memainkan peranan politik yang cukup menonjol dalam proses politik lokal” sebagaimana yang dinyatakan oleh Bruinessen (Soparianti, 2009).

Secara lebih khusus, *tuanku* tarekat Syattariyah juga terlihat terlibat secara aktif dalam kancah politik praktis lokal dengan menjadi pengurus partai politik. Hal ini dapat terlihat dari fenomena sepuluh orang *tuanku* tarekat Syattariyah yang menjadi pengurus partai politik pada tingkat daerah Kabupaten Padang Pariaman. Mereka terlihat menjadi pengurus pada partai politik seperti: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),¹¹ Partai Bulan Bintang (PBB),¹² Partai

¹⁰ Tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walaupun bagaimanapun bentuk dan ajaran yang mendasarinya- menitik-beratkan kepada upaya setiap diri manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga mencapai tahap kesempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002: 13).

¹¹ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki azas Pancasila (nasionalis). Informasi mengenai PKB dapat diperoleh di : www.dpp-pkb.org (Yatim *et al*, 2010: 6). Untuk diskusi selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa akan disingkatkan menjadi PKB.

Golongan Karya (GOLKAR),¹³ Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),¹⁴ dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).¹⁵ Yang menarik dari fenomena ini adalah: Secara mayoritas, *tuanku* tarekat Syattariyah yang melakukan partisipasi politik kepartaian di Padang Pariaman lebih memilih untuk bergabung dengan partai nasionalis, dari pada bergabung ke dalam partai Islam.¹⁶ Walaupun ada yang bergabung ke partai Islam, jumlahnya sangat tidak signifikan.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Fenomena kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah untuk bergabung ke dalam partai yang memiliki ideologi nasionalis (sekuler) dibandingkan partai Islam pada dasarnya kurang sesuai dengan konsep yang selama ini diyakini oleh para sarjana ilmu politik di Indonesia. Menurut perspektif teoretik (*das sollen*), dalam konteks politik Indonesia diyakini bahwa terdapat hubungan kuat di antara orientasi keagamaan individu dengan pilihan partai politiknya. Muslim yang taat (*santri*) akan memiliki kecenderungan untuk memilih partai Islam. Sedangkan individu

¹² Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki azas Islam. Hal ehwal mengenai PBB dapat diperoleh melalui web: www.pbb-info.com (Yatim *et al*, 2010: 10). Untuk diskusi selanjutnya, Partai Bulan Bintang akan disingkatkan menjadi PBB.

¹³ Partai Golongan Karya (Partai Golkar) memiliki azas Pancasila (nasionalis). Informasi mengenai Partai Golkar dapat diperoleh di web : www.golkar.or.id (Yatim *et al*, 2010: 9). Untuk diskusi selanjutnya, Partai Golongan Karya disingkat menjadi Partai Golkar.

¹⁴ Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memiliki azas Pancasila (nasionalis). Untuk informasi mengenai partai HANURA silahkan lacak web: www.hanura.com (Yatim *et al*, 2010: 3). Untuk diskusi selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat akan disingkatkan menjadi partai HANURA.

¹⁵ Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memiliki azas Pancasila (nasionalis). Untuk informasi lebih lanjut di web: www.pkpb.net (Yatim *et al*, 2010: 3). Untuk diskusi selanjutnya, Partai Karya Peduli Bangsa akan disingkatkan menjadi PKPB.

¹⁶ Partai nasionalis adalah partai yang tidak bisa diidentikkan dengan kelompok keagamaan tertentu. Partai ini berorientasi nasionalis lintas agama, dan masing-masing berazaskan kepada Pancasila. Partai nasionalis ini sering juga disebut sebagai partai *non-Islam* (Liddle dan Mujani, 2000). Partai nasionalis ini terkadang sering juga diistilahkan sebagai partai sekuler. Dalam konteks ini, menurut Al Chaidar (2008: 14-19), partai sekuler dideinisikannya sebagai partai yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memandang partai secara pragmatik sebagai alat pembuatan kebijakan dan arah tujuan negara, serta bertujuan kepada negara sekuler yang makmur, bahagia, dan sejahtera. Di antara Partai yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Partai Demokrat (PD), Partai Hanura, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), PKB, dan lain-lain (Mujani dan Liddle 2010: 36).

Sedangkan partai Islam menurut Liddle dan Mujani (2000) ialah partai yang secara tegas dan resmi menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang berideologi Islam dalam anggaran dasar dan rumah tangga partainya. Agenda partai Islam adalah untuk mengembalikan tujuh kata dalam piagam Jakarta yang berbunyi: Ketuhanan yang maha esa, *dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penganutnya*, dalam silahkan pertama Pancasila. Sedangkan menurut Al Chaidar (1998: 14-19) partai Islam ialah partai yang dipimpin oleh tokoh Islam, memakai azas Islam maupun bukan Islam sebagai dasar partai, dan dalam meraih suara menjadikan umat Islam sebagai basis utama pendukung. Dalam hal ini, PPP, PBB, PKS, merupakan di antara partai yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam.

Dalam konteks perbedaan partai Islam dan dan partai nasionalis ini perlu juga ditegaskan bahwa dua tipologi ini dibuat oleh para sarjana untuk keperluan analisis berdasarkan kepada arah tujuan perjuangan yang tercantum dalam anggaran dasar partai. Tipologi ini tidak bisa ditafsirkan bahwa semua individu di dalam partai nasionalis (sekuler) adalah bukan Muslim, karena dalam partai nasionalis juga ramai terdapat individu Muslim.

abangan (muslim yang tidak atau kurang taat), cenderung memilih partai sekuler (Gaffar dalam LSI, 2007a: 17; Mujani, 2004). Pendapat ini diperkuat oleh Liddle dan Mujani, yang juga menemukan adanya pengaruh di antara orientasi keagamaan individu dengan partai yang dipilihnya, walaupun pengaruh tersebut tidak sekuat dan sebesar yang dinyatakan oleh Gaffar (LSI, 2007: 17).¹⁷

Apabila menurut logika *das sollen* di atas, seyogianya *tuanku* tarekat Syattariyah akan lebih cenderung bergabung ke dalam partai Islam, seperti : Partai Persatuan Pembangunan (PPP),¹⁸ Partai Keadilan Sejahtera (PKS),¹⁹ dan Partai Bulan Bintang (PBB), bukannya kepada partai nasionalis (sekuler). Namun demikian, secara *das sein*-nya fenomena menunjukkan bahwa *tuanku* tarekat Syattariyah pada umumnya lebih memiliki kecenderungan untuk bergabung ke dalam partai nasionalis (sekuler) dibandingkan kepada partai Islam. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji: apakah yang menyebabkan *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik kepartaian di Padang Pariaman ? Dengan demikian, tulisan bertujuan mengidentifikasi penyebab *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik kepartaian di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

¹⁷ Perlu dijelaskan di sini bahwa konsep hubungan kuat di antara orientasi keagamaan individu dengan pilihan partai politiknya, merupakan temuan kajian perilaku memilih (*voting behavior*) dari model sosiologi (LSI, 2007). Model Sosiologi memiliki asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologi para pemilih, utamanya faktor kelas sosial, agama dan kelompok etnis/kedaerahan. Hasil kajian orientasi keagamaan individu dengan pilihan partai politik melihat hubungan di antara faktor agama yang dianut oleh seseorang individu dengan pilihan partai politiknya. Muslim *santri* memiliki kecenderungan untuk mendukung partai Islam, karena mereka berasumsi bahwa hanya partai Islam yang bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam dan penegakan syari'ah Islam di Indonesia. Sedangkan Muslim *abangan* akan cenderung mendukung partai sekuler karena mereka merasa tidak nyaman apabila bergabung partai Islam, karena perbedaan "ideologi" di antara muslim *santri* dengan muslim *abangan* yang sangat jelas.

Perlu juga diingat, pada waktu orde lama dan awal orde baru dalam konteks politik Indonesia, perbedaan dan pertarungan ideologi di antara partai-partai politik sangatlah sengit (nasionalis, Islam, dan komunis, serta sosialis). Apalagi sikap politik otoriter rezim orde lama dan orde baru (awal) yang cenderung sangat "fobia" dan menekan umat Islam (karena khawatir umat Islam akan mengganti ideologi Pancasila dengan Islam), telah mengakibatkan sebahagian umat Islam bersikap *anti* terhadap pemerintah. Sebagai dampaknya, kaum *santri* cenderung menjadi kaum oposisi terhadap pemerintah, sehingga mereka bergabung partai Islam dan tidak mau bergabung ke partai nasionalis (seperti Golkar dan PDI pada waktu awal orde baru), yang didukung oleh pemerintah. Untuk pemahaman selanjutnya, silahkan rujuk: Baswedan (2004), Turmudi (2003), Romli (2006), LSI (2007a, 2007b), Mujani (2007), dan lain-lain.

Konsep "hubungan kuat di antara orientasi keagamaan individu dengan pilihan partai politik" tidaklah kemudian dapat ditafsirkan bahwa apabila ada *santri* yang memilih partai sekuler/nasionalis maka *santri* tersebut telah berubah menjadi *abangan*, demikian juga sebaliknya. Konsep ini juga tidak memiliki tendensi bahwa yang bergabung partai Islam adalah "muslim yang "sebenarnya"", sedangkan muslim yang bergabung partai nasionalis adalah "bukan muslim yang "sebenarnya"". Ini adalah kecenderungan *partaisanship* yang terjadi di Indonesia.

¹⁸ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki Azas Islam. Informasi selengkapnya mengenai PPP dapat diperoleh di : www.ppp.or.id (Yatim *et al*, 2010: 9).

¹⁹ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki azas Islam. Informasi mengenai PKS dapat diperoleh melalui web: www.pk-sejahtera.org (Yatim *et al*, 2010: 5).

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses untuk memahami masalah sosial atau manusia, dengan berdasarkan kepada penciptaan gambaran yang bersifat saling berkaitan antara satu sama lain, sebagai suatu sistem yang menyeluruh (*holistic*), dan dibentuk dengan kata-kata dalam sebuah latar alami (Creswell, 2003 :1).²⁰ Pendekatan kualitatif memiliki kemampuan untuk menyediakan deskripsi yang lengkap mengenai pengalaman individu, kepercayaan-kepercayaan, pendapat-pendapat, perasaan, dan hubungan-hubungan pribadi. Pendekatan ini juga dianggap mampu untuk menyelidiki faktor-faktor yang tidak terlihat (*intangible*) seperti norma sosial, status sosial ekonomi, peranan gender, etnik, dan agama, yang berperanan dalam isu penelitian yang mungkin tidak dapat dibaca dengan nyata (Mack *et.al*, 2005: 1).

Unit analisis adalah *tuanku* tarekat Syattariyah yang menjadi pengurus partai nasionalis tingkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Para informan terpilih melalui teknik *snowball sampling (chain referral)* (Chua Yan Piaw, 2006: 202). Selain informan utama (*tuanku* tarekat Syattariyah yang menjadi pengurus partai nasionalis pada tingkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman), juga diwawancarai informan *tringulasi (cross check)* yang terdiri dari individu *tuanku* dan *non tuanku*, di mana mereka diyakini memahami dan memiliki informasi yang diperlukan mengenai fokus kajian. Informasi dari para informan di-*cross check* melalui teknik *triangulasi (triangulation)* (Kanto, 2003: 59). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian perpustakaan (*library research*). Data dianalisis dengan menggunakan model strategi analisis deskriptif kualitatif (Bungin, 2003: 83), yang dilakukan secara serentak dengan proses pengumpulan data. Dalam penggunaan model strategi analisis deskriptif kualitatif, secara lebih spesifik menggunakan metode analisis komponensial (*componential analysis*), yang dilakukan ketika seluruh kegiatan wawancara telah memperoleh hasil yang maksimum (Bungin, 2003: 95-96). Keabsahan data diukur dari derajat “keterpercayaan” (*trustworthiness*), dan “keaslian” (*authenticity*) (Salim, 2001: 78), dimana keduanya diukur dari standar kredibilitas (*credibility*)

²⁰ Metode kualitatif bersifat penafsiran yang wajar terhadap setiap perwaktulahannya, dan bekerja dalam *setting* alami, yang berusaha untuk memahami dan memberi tafsiran terhadap fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan oleh orang-orang kepadanya (Salim, 2001: 5). Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau membuat generalisasi yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan hanya lebih difokuskan kepada representasi terhadap fenomena sosial (Kanto dalam Bungin, 2003: 53).

(Kanto, 2003: 59), dengan memperpanjang proses pengumpulan data, dan triangulasi data (*data triangulation*).

D. TINJAUAN KONSEPTUAL

Untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini, digunakan kerangka konseptual tentang relasi ulama tarekat dengan politik. Menurut E.W Lane (Azra, 1999: 157-158), secara *etimology*, kata *‘ulama* merupakan bentuk jamak dari kata benda (*fa‘il*) *‘alim*, yang berasal dari kata kerja *‘alima* yang bermaksud “mengetahui” atau “memiliki pengetahuan tentang.” Sedangkan *‘alim* bermakna seseorang yang memiliki *‘ilm* (ilmu) sebagai suatu kekuatan yang memiliki akar kuat dalam ilmu pengetahuan, seseorang yang sangat terpelajar (*larned*) dalam ilmu pengetahuan dan *literature*. Secara mudahnya, *‘ulama* adalah para pemilik *‘ilm*. Namun demikian, tidak setiap orang yang memiliki *‘ilm* (*pengetahuan*) layak disebut sebagai ulama. Gelar ulama hanya pantas diberikan kepada orang-orang yang dianggap ahli dalam ilmu-ilmu agama (*al-‘Ulum al-Diniyah*), yang mempunyai hak-hak istimewa (*priveleges*) untuk disebut sebagai ulama.

Secara *terminology*, ulama ialah gelar bersifat umum untuk sarjana hukum Islam yang secara tradisional berfungsi sebagai mubaligh, guru, dan tempat bertanya bagi umat Islam (Horikoshi, 1987: 36). Ulama memiliki tugas sebagai pejabat keagamaan pada pranata keulamaan Islam, dan mengkhususkan diri untuk melahirkan calon ulama serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga ortodoksi Islam (Horikoshi, 1987: 2). Peranan ulama sebagai ahli hukum Islam ortodoksi adalah untuk menjamin pengamalan keagamaan para penganutnya, dan memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan kenegaraan dari perspektif *Syari‘at* Islam (Horikoshi, 1987: 36).

Di antara para ulama dalam Islam, terdapat ulama yang terlibat dalam tarekat (*tariqah*, jamak *turuq*) (Azra, 1999: 162), Sehingga mereka disebut sebagai ulama tarekat. mereka merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan dan memainkan peranan penting” sebagai pemimpin dalam tarekat (Atjeh, 1980: 62), tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “guru” tarekat (Dobbin, 1974: 326). Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan (Pramono dan Bahren, 2009: 105).

Sedangkan tarekat, secara etimologi menurut al-Yasu‘i (dalam kitab *al-Munjidu fi Lughatu wa al-Adab wa al-‘Ulum*), berasal dari kata bahasa Arab “*al-Tariqatun*” yang bermaksud

“jalan atau waktu”. Gibb dan Kramers dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, mengartikan tarekat sebagai “cara” (Istadiyantha, 2006). Sedangkan secara *terminology*, tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walaupun bagaimanapun bentuk dan ajarannya-menitikberatkan kepada setiap upaya seseorang Muslim untuk mengembangkan potensinya, sehingga mencapai tahap kasusempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002: 13).²¹

Berdasarkan definisi tarekat di atas, tidak mengherankan apabila ada perspektif yang mengatakan bahwa tarekat merupakan suatu gejala depolitisasi, sangat menghindari sikap politik, dan merupakan bentuk pelarian tanggungjawab sosial dan politik (Bruinessen, 1992: 3-14). Namun demikian, anggapan ini sepertinya dinafikan oleh fakta dalam sejarah peradaban Islam di berbagai belahan dunia yang menunjukkan; sepanjang abad ke 19 dan awal abad ke 20 M ulama tarekat telah berhasil muncul sebagai pemimpin gerakan *protest* yang menantang dominasi kekuasaan kolonialisme yang *otoritarian*. Kelompok tarekat tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tahap kasusempurnaan spiritual, akan tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi sosial politik (Thohir dan Riyadi, 2002: 17-18). Hal ini pada hakikatnya merupakan anti tesis terhadap perspektif yang mengatakan bahwa tarekat merupakan gejala depolitisasi. Dengan demikian, ulama tarekat dianggap lebih memfokuskan diri menekuni dunia spiritual dan kurang/tidak bersentuhan dengan dunia politik yang dianggap “kotor” tampaknya kurang bisa diterima. Sejak dahulu, kelompok tarekat di berbagai pelosok dunia sudah bersentuhan dengan politik dan kekuasaan (Soprianti 2009). Hal ini juga diperkuat oleh Gibb dan Bowen, yang juga menafikan ulama tarekat tidak memiliki *interest* terhadap politik (Azra, 1999: 170).

Dengan demikian, walaupun tarekat merupakan aktifitas pembersihan diri dan lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia, akan tetapi ulama tarekat masih peduli dengan isu-isu politik (Sujuthi, 2001). Mereka tidak hanya memainkan peranan dalam kehidupan agama saja, akan tetapi juga berkecimpung dalam aktifitas sosial dan politik, sehingga kemudiannya muncul sebagai pemimpin sosial dan politik (Horikoshi, 1987: 1).

²¹ Tarekat dan tasawuf pada umumnya juga dimaknai sebagai aktivitas kehidupan *zuhud*, rela hidup prihatin, melakukan berbagai jenis ibadah, melaparkan diri, mengerjakan shalat malam, dan melantunkan berbagai jenis wirid sampai fisik menjadi lemah. Sedangkan dimensi ruhani (jiwa) menjadi kuat (Thohir & Riyadi, 2002: 14). Tarekat juga dipahami “suatu sistem atau petunjuk dalam melakukan ibadah untuk memperoleh ridha Allah, dibimbing oleh seorang guru/*murshid*” (Atjeh, 1985: 67), lebih mengutamakan aspek batiniah dari pada aspek lahiriah melalui memperbanyak zikir kepada Allah (LIMTI, 1989: 59), bertujuan untuk mensucikan batin (Mircea Eliade, seperti dikutip Mulyati. *et.al*, 2004: 153).

Di Indonesia, interaksi politik ulama tarekat dengan partai nasionalis dimulai pada waktu orde baru, ketika Kiai Musto'in Ramli (pimpinan tarekat Qadiriyah wa Naqshabandiyah) bergabung ke dalam partai Golkar menjelang pemilu 1977 (Sujuthi, 2001: 65). Kiai Musto'in Ramli mengatakan kepada pengikutnya bahwa ia bermimpi bermain layang-layang bergambar bumi yang dikelilingi oleh sembilan bintang (simbol NU), dan melihat pohon beringin (lambang partai Golkar) melindungi pesantrennya (Turmudi, 2004: 133-134). Ini menunjukkan bahwa kiai tarekat memberikan justifikasi terhadap motivasi dan tindakan politiknya bergabung partai nasionalis dengan menggunakan metafora tertentu.

Bergabungnya Kiai Musto'in Ramli ke dalam partai nasionalis (golkar) diyakini telah menunjukkan indikasi terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai "politik aliran", sebagai konsep "*partisanship*"²² dalam perilaku politik kepartaian di Indonesia. Sebelum akhir tahun 1970-an, arus utama (*mainstream*) sarjana politik *Indonesianist* meyakini bahwa dalam *partisanship* di Indonesia ada apa yang disebut sebagai "politik aliran", yaitu adanya faktor agama sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam politik kepartaian (Sujuthi, 2001: 70). Perspektif politik aliran dalam memahami hubungan di antara agama dan pilihan partai politik individu ini sangat kuat mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia (Mujani, 2004).

Konsep politik aliran menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat di antara faktor agama seseorang dengan pilihan partai politiknya. Ketaatan dan kesusalehan seorang Muslim akan terlihat dari afiliasi politiknya (Sujuthi, 2001: 70). Individu yang beragama Islam cenderung akan memilih dan bergabung kepada partai Islam. Sedangkan individu yang tidak beragama Islam cenderung untuk memilih dan bergabung kepada partai nasionalis. Muslim yang taat keislamannya (*santri*)²³ memiliki kecenderungan untuk bergabung ke partai Islam. Sedangkan individu dengan latar belakang *abangan* (tidak atau kurang taat),²⁴ akan cenderung

²² Menurut *Oxford Dictionaries* (2010), salah satu arti kata *partisanship* adalah keberpihakan kepada pihak tertentu; "*an act of blatant political partisanship*", yaitu suatu tindakan sikap berat sebelah secara politik. *Partisanship* secara definisinya dapat dipahami sebagai suatu perasaan positif terhadap partai politik tertentu, sebagai penyambung dan penyalur kepentingan masyarakat. *Partisanship* membantu mengintegrasikan warga negara ke dalam sistem kepartaian yang menjadi bahagian dari sistem demokrasi secara keseluruhan (Mujani, 2007: 303).

²³ *Santri* merupakan muslim saleh yang menganut agama Islam secara bersungguh-sungguh dan dengan cermat menjalankan kewajiban agama Islam sebagaimana mestinya, sambil berusaha membersihkan akidahnya dari syirik yang terdapat di daerahnya. Identitas *santri* ini juga ditandai oleh keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas ibadah keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan (Muchtarm, 1988: 5).

²⁴ *Abangan* merupakan muslim Jawa yang tidak seberapa taat dalam memperhatikan ajaran agama Islam, dan kurang cermat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban agama. Walaupun mengaku Islam, namun cara kehidupan masih banyak dikuasai oleh tradisi Jawa sebelum Islam. Tradisi mereka menitikberatkan kepada usaha untuk memadukan unsur-unsur Islam dengan Buddha-Hindu serta unsur-unsur asli sebagai *syncretism* Jawa yang sering dinamakan sebagai agama Jawa (*Kejawen*). Jadi dengan demikian, perbedaan *santri* dengan *abangan*

bergabung ke partai nasionalis sekuler. Konsep politik aliran ini dibenarkan oleh hasil kajian: Mallarangeng (1997), Gaffar (1992), King (2003) dan Ananta *et.al* (2004) (LSI, 2007a: 17 ; Mujani, 2004).

Konsep politik aliran dikembangkan dari konsep Geertz (1962) yang mempercayai bahwa dukungan pemilih dalam pemilu terhadap PNI (Partai Nasionalis Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) di satu pihak, serta Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan NU (Nahdatul Ulama) pada pihak lain, merupakan cerminan dua bentuk perilaku sosial keagamaan masyarakat Jawa, yaitu : *abangan* dan *santri* (LSI, 2007a: 17 ; Mujani, 2004). Geertz membagi orang Jawa menjadi tiga bentuk budaya utama berdasarkan variasi keagamaan mereka, yaitu: *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. *Abangan* mewakili sikap menitikberatkan aspek-aspek *syncretism* Jawa, dan secara luas berkaitan dengan unsur-unsur petani di antara penduduk. *Santri* pula, mewakili sikap yang menitikberatkan kepada aspek aspek Islam dalam *syncretism* tersebut. Pada umumnya mereka berkaitan dengan unsur-unsur pedagang, dan unsur-unsur tertentu di antara petani. Sedangkan *priyayi* merupakan sikap yang menitikberatkan kepada aspek-aspek Hindu dan berkaitan dengan unsur-unsur administrasi (Muchtarmom 1988: 2).

Hasil kajian Liddle dan Mujani (2000; LSI, 2007a: 17) juga masih menemukan korelasi positif perbedaan di antara agama (Islam *versus* non-Islam) dalam memilih partai dalam kajian mereka, walaupun kecenderungan tersebut relatif lemah. Seorang Muslim cenderung bergabung partai Islam, sedangkan non-Muslim cenderung memilih partai *non-Islam*. *Santri* memiliki korelasi dengan partai Islam, sedangkan non-santri akan bergabung dengan partai non-Islam (nasionalis sekuler). Namun demikian korelasi ini juga lemah, tidak sebesar yang diyakini selama ini. Santri sebagai kelompok mayoritas dalam masyarakat Muslim Indonesia secara mayoritas tidak mendukung partai-partai Islam. Sebaliknya, secara mayoritas santri telah bergabung ke partai nasionalis. Sungguhpun begitu, mayoritas santri masih lagi memilih sebagian besar partai-partai Islam. Secara umum hasil kajian ini menunjukkan masih adanya politik aliran di Indonesia, walaupun telah mulai memudar pada tingkat *massa*. Namun demikian, memudarnya perilaku politik aliran ini tidak terjadi pada tingkat pemimpin politik (*elite*) (Liddle dan Mujani, 2000).

Bergabungnya ulama tarekat kepada partai nasionalis secara umum merupakan salah satu pembeda bahwa *partisanship* politik kepartaian umat Islam di Indonesia telah mengalami

terletak dari perilaku keagamaannya (Muchtarmom, 1988: 5-6). Dalam bahasa sederhana dapat dipahami bahwa *abangan* dan *santri* merupakan pengelompokan masyarakat Jawa yang berdasarkan kepada kepatuhan seseorang Muslim dalam mengamalkan syariat Islam. Perbedaan di antara kalangan *santri* dengan *abangan* ini diyakini memiliki kaitan dengan dukungan terhadap partai politik (Liddle dan Mujani, 2000).

fenomena yang disebut sebagai “desakralisasi politik,” yaitu memudarnya peranan agama dan kelas sosial dalam kehidupan politik. Desakralisasi politik ini merupakan pertanda semakin meluas dan dalamnya sekulerisasi nilai-nilai politik pada kalangan umat Islam di Indonesia (LSI, 2007b).²⁵ Politik tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang suci, dan selalu diidentikan dengan agama. Ketaatan dalam beragama dengan pilihan-pilihan politik dilihat sebagai dua hal yang mulai terlihat terpisah (Mujani, 2004). Bagi ulama tarekat, “politik” yang selama ini diidentikan dengan konsep keagamaan (tidak ada pemisahan antara agama dan politik), telah berubah kepada konsep “politik” yang tidak memiliki kaitan dengan amalan agama. Politik mulai dipahami dalam perspektif yang “rasional” untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Sehingga dengan demikian, dalam menentukan pilihan dan afiliasi partai politiknya kaum tarekat telah menjadi pragmatis-rasional (Pababbari, 2010: 594).

Pilihan dan sikap politik ulama tarekat bergabung ke partai nasionalis didasari oleh pertimbangan; partai politik hanyalah wadah perjuangan. Seorang muslim yang taat dan saleh tidak harus bergabung dengan partai Islam. Partai atau organisasi apapun bisa digunakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan berjuang untuk kepentingan umat Islam (Sujuthi, 2001: 71). Oleh karena itu, (dalam konteks ini) politik tidak lagi memiliki kaitan dengan Islam. Tidak ada lagi kewajiban moral bagi ulama tarekat dalam kapasitasnya sebagai seorang Muslim untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Ulama tarekat tidak lagi ragu untuk bergabung dengan partai nasionalis, suatu tindakan yang dulunya dianggap mempunyai konsekuensi-konsekuensi keagamaan (Turmudi, 2004: 241-242).

Keputusan ulama tarekat untuk bergabung ke partai nasionalis juga merupakan pengakuan terhadap penafsiran yang berbeda dalam Islam politik.²⁶ Mereka mengajarkan sebuah pemahaman bahwa Islam politik tidak perlu terbatas ke dalam partai Islam. Aktifitas

²⁵ Fenomena desakralisasi politik dalam kalangan umat Islam di Indonesia, diyakini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengembangkan ideologi memisahkan pemahaman agama dengan politik di kalangan umat Islam, yang sering juga dikenali sebagai “depolitisasi Islam” (Sujuthi, 2001). Pemerintah Orde Baru mengembar-gemborkan bahwa amalan tarekat (Islam) harus dibedakan dan dipisahkan dengan pilihan politik, karena pilihan politik merupakan hak pribadi warga negara, tidak memiliki kaitan dengan amalan agama (Pababbari, 2010: 593).

²⁶ Penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah “Islam politik” dari pada “politik Islam” dalam pembahasan mengenai aktivitas politik yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam konteks ini, penulis setuju dengan pendapat Baswedan (2004: 670) yang mendefinisikan Islam politik sebagai; usaha mempromosikan aspirasi umat Islam dan membawa agenda Islam ke dalam hukum dan kebijakan pemerintah, melalui pemilu dan perwakilan di parlemen. Tidak ada kesepakatan ke atas apa yang disebut sebagai cita-cita agenda Islam. Akan tetapi waktulah ini berkisar pada azas moral negara dalam prosedur kebijakan-kebijakannya, termasuk usaha untuk memasukkan syariat Islam secara resmi ke dalam konstitusi negara, dan mempromosikan kebijakan pemerintah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat Islam. Jadi dengan demikian Islam politik mencakupi segala aktivitas umat Islam dalam politik.

dalam kepartaian dapat saja melalui partai politik mana pun, yang memungkinkan untuk pencapaian tujuan-tujuan Islam. Dengan demikian ulama tarekat mencoba mendelegitimasi struktur sosial yang telah ada dalam politik. Mereka mencoba membangun kembali tatanan tersebut dengan pandangan yang lebih luas, bahwa partai Islam hanyalah salah satu di antara berbagai alat dalam perjuangan demi umat Islam (Turmudi, 2004: 134-135).

Desakralisasi politik pada kalangan umat Islam di Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mujani (2004) di atas, menurut Kuntowijoyo (2007) telah membawa ulama tarekat kepada arah “pragmatis religius” dalam perilaku politiknya. Konsep pragmatis religius menunjukkan terjadinya transformasi yang mendasar dalam dunia politik, yaitu hilangnya pemisahan (*dichotomy*) antara kaum sekuler (*abangan*) dengan kaum religius (*santri*) dalam perpolitikan Indonesia. Individu pragmatis religius bersandarkan kepada prinsip dasar “semua urusan mempunyai dimensi rasional, ketuhanan, dan kemanusiaan” dalam melakukan aktifitas politik kepartaian. Sebagai *antropo-teosentrisme*, mereka mencoba untuk mengintegrasikan paham dan prinsip sekuler dengan religius, kepentingan manusia dengan “kepentingan” Tuhan, serta kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Mereka juga mengelola berbagai urusan secara rasional dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sebagai konsekuensi dari kecenderungan pragmatis religius, individu yang secara pribadi terlihat sangat “taat beribadah” dan sangat religius, bisa saja memisahkan segala “urusan kehidupan dunia” dengan agama yang diyakininya.

E. DESKRIPSI DATA

1. *Tuanku*: Ulama Tarekat Syattariyah dalam Konteks Lokal

Dalam konteks tarekat Syattariyah di Padang Pariaman, *tuanku* merupakan ulama tradisional yang memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat. Mereka merupakan tokoh yang dimuliakan dan menjadi ikutan, karena merupakan “pemimpin sekaligus guru” bagi para jemaah tarekat *Syattariyah* (Dobbin, 1974: 326). Selain itu, mereka juga menjadi tumpuan dalam pembentukan ideologi penganut tarekat Syattariyah di Minangkabau (Pramono & Bahren, 2009: 104). Para *tuanku* ini sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat. Bahkan ketika *tuanku* tersebut sudah meninggal dunia pun, kehadirannya masih dapat ditemukan melalui tulisan-tulisan mengenai riwayat dan ajarannya yang ditulis oleh para pengikutnya. Riwayat dan ajaran tersebut selalu dijadikan

rujukan dalam pengambilan keputusan oleh, tidak hanya terbatas mengenai masalah keagamaan, akan tetapi juga mengenai masalah sosial budaya serta politik (Prmono dan Bahren, 2009: 105).

Secara *etimology*, kata “*tuanku*” telah dimaknai secara beragam oleh berbagai kalangan, sehingga muncul empat pendapat utama yang berbeda. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa kata “*tuanku*” atau “*tuangku*” berasal dari bahasa Minang, yaitu “*tuan*” yang memiliki arti “*kakak*,” dan “*ku*” yang memiliki makna “*aku*”. Jadi dengan demikian, *tuanku* memiliki arti “*kakak ku*”. Sedangkan pendapat *kedua*, mengatakan bahwa kata *tuanku* berasal dari kata bahasa Aceh yaitu “*tengku*”, gelar kebangsawanan Aceh bagi orang ‘alim di bidang *syara*’ (agama Islam). Sedangkan pendapat *ketiga*, meyakini bahwa kata *tuanku* berasal dari kata “*daulat tuanku*”, yang diambil dari pada gelar Raja-Raja kesultanan Melayu Malaka (Samad, 2002: 38-39). Pendapat *keempat*, Anas Nafis mengatakan bahwa gelar *tuanku* berasal dari gelar sultan atau raja di pesisir Timur Sumatera dan Riau (Armaid Tanjung, 2007: 18-19). Kemudiannya gelar *tuanku* ini mulai dipergunakan sebagai gelar untuk ulama tradisional di Minangkabau, sejak gelar ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin dari Aceh, dan diberikannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang cukup tinggi, yang serta mendampinginya dalam berdakwah (Samad, 2002: 38-39).²⁷

Namun demikian, pendapat di atas dibantah oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa pemakaian gelar *tuanku* untuk ulama Islam di Minangkabau merupakan warisan para ulama pemimpin perang paderi,²⁸ yang menggunakan gelar *tuanku* sebagai panggilan untuk diri mereka, ketika pernah berkuasa dalam masa singkat setelah berhasil mengalahkan sebagian penguasa adat Minangkabau (penghulu dan orang besar lagi bertuah) pada tahun 1804 M (Armaid Tanjung, 2007: 20).

Terlepas dari perdebatan secara *etimologi* dan sejarahnya, gelar *tuanku* dalam konteks kekinian, dipahami masyarakat Padang Pariaman (umumnya Minangkabau) sebagai gelar

²⁷ Sebagai contohnya, gelar *tuanku* telah diberikan oleh Syekh Burhanuddin kepada *Tuanku Idris Majolelo*, yang merupakan sahabat karib Syekh Burhanuddin ketika menuntut ilmu kepada *Tuanku Madinah* (Samad, 2002: 38-39).

²⁸ Perang paderi adalah perang saudara di Minangkabau (Sumatera Barat), di antara kaum paderi yang berfaham *wahabiyah* dengan kaum adat yang mempertahankan adat Minangkabau. Kaum paderi mengatakan bahwa mereka tidak hanya penguasa agama Islam saja, akan tetapi juga merupakan penguasa politik. Oleh karena itu mereka merasa perlu dipandang sebagai raja dan diberi gelar *tuanku*. Dengan demikian, adalah hal yang lazim apabila para pemimpin paderi yang dijuluki *harimau nan selapan* (delapan harimau) memakai gelar *tuanku*, seperti: *Tuanku Nan renceh*, *Tuanku Pamansiangan*, *Tuanku Imam Bonjol*, *Tuanku Nan Tuo*, *Tuanku Pasaman*, *Tuanku Tambusai*, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan ulama-ulama gerakan paderi yang berkuasa dalam urusan pemerintahan dan administrasi di *nagari*-nya masing-masing (seperti menjadi *imam* dan *qadhi*), juga diberikan gelar *tuanku* (Armaid Tanjung, 2007: 22).

akademik dan gelar kebesaran untuk ulama tradisional tarekat Syattariyah, dan guru di pondok pesantren *salafiyah* (tradisional) (Abdul Razak *Tuanku* Mudo, seperti dikutip Armaidani Tanjung, 2007: 24). Dengan demikian, menurut Abdul Razak *Tuanku* Mudo, gelar *tuanku* merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang dihormati (Armaidani Tanjung, 2007: 18-19), yang dipandang mampu dan bijak dalam menyampaikan agama Islam atau ulama (Samad, 2002: 38-39). Gelar *tuanku* untuk ulama tradisional tarekat Syattariyah di Minangkabau ini merupakan suatu keistimewaan tersendiri, yang berbeda dengan tradisi pesantren di nusantara pada umumnya (Armaidani Tanjung, 2007: 24).

Selain menguasai ilmu agama Islam secara mendalam, *tuanku* juga diharuskan memiliki pemahaman adat Minangkabau dengan baik, karena *tuanku* merupakan persenyawaan dan titisan dari falsafah adat Minangkabau "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendikan kepada agama Islam, agama Islam bersendikan kepada al-Qur'an dan al-Hadith). Dengan demikian, *tuanku* merupakan seorang ulama sekaligus menjadi pemimpin adat Minangkabau, dan digelar sebagai "*tepiian adat, halaman syarak*". Oleh karena itulah, *tuanku* harus memiliki pengetahuan agama Islam dan adat Minangkabau, yang dinyatakan melalui ungkapan "*memahami rukun tigo baleh surau* (rukun tiga belas surau), dan *rukun tigo baleh kampung* (rukun tiga belas kampung) (M. Letter *Tuanku* Bagindo, seperti yang dikutip Rahmat *Tuanku* Sulaiman, 2006).²⁹

2. PENYEBAB TUANKU TAREKAT SYATTARIYAH BERGABUNG KE PARTAI NASIONALIS

2.1 Perbedaan Paham Diantara Modernis Islam Dengan Tradisionalis Islam

Informan menyatakan bahwa penyebab *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik kepartaian adalah karena adanya perbedaan paham di antara modernis Islam dengan tradisionalis Islam. Dalam perspektif *tuanku* tarekat Syattariyah, PPP merupakan partai yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki paham modernis Islam, yang cenderung kurang mengakomodir dan menghargai paham tradisionalis Islam seperti tarekat Syattariyah. Apabila bergabung dengan

²⁹ Rukun tiga belas surau memiliki arti: tiga belas rukun dalam shalat. Ini merupakan ungkapan untuk mencerminkan keahlian *tuanku* dalam ilmu agama Islam. Sedangkan rukun tiga belas kampung memiliki arti: tiga belas nilai-nilai utama adat yang harus dipahami dan diamalkan oleh orang Minangkabau ketika berinteraksi dalam masyarakat (Rahmat *Tuanku* Sulaiman, 2006).

partai ini, maka para *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah merasa kurang mendapat penghargaan sebagaimana seharusnya, karena memiliki paham keagamaan dan *‘amaliah* yang berbeda dengan kaum modernis Islam dalam PPP tersebut.

Dengan adanya perbedaan amalan dan paham mengenai Islam ini, maka penghargaan terhadap *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional tarekat Syattariyah tidak akan mendapat tempat, sehingga akan terabaikan dan dikucilkan oleh kaum modernis Islam dalam PPP. Keadaan ini semakin bertambah buruk dengan kurangnya pendekatan PPP kepada *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah. Disebabkan oleh karena inilah maka sangat jarang sekali ada *tuanku* tarekat Syattariyah yang bergabung dengan PPP. Walaupun ada *tuanku* yang memasuki PPP, itu dianggap sudah tidak lagi memakai pertimbangan *‘amaliah* dan kepentingan tarekat Syattariyah.

Pemahaman *tuanku* tarekat Syattariyah terhadap PPP sebagaimana yang diuraikan di atas, terlihat memiliki validitas yang cukup dapat diterima, karena terlihat memiliki persamaan dengan pernyataan Muhibbuddin³⁰ ketika ditanya mengapa ia lebih memilih bergabung dengan partai nasionalis seperti Partai Golkar dibandingkan PPP pada masa orde baru. Dalam hal ini, menurutnya:

PPP sebenarnya dikuasai oleh kaum modernis, yang merupakan ancaman terhadap amalan-amalan dan kepercayaan kita (tarekat) dibandingkan dengan Golkar yang sekuler.”..... kami merasa lebih aman di mana ada orang banyak, dan tentu saja itu Golkar” (Bruinessen, 1996: 145).

Demikian juga halnya apabila *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung ke dalam partai Islam lain seperti PKS, juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik, karena PKS juga dianggap sebagai partai yang banyak terdapat modernis Islam di dalamnya. Dengan demikian PKS juga dianggap memiliki perberbedaan kultural dan paham keagamaan dengan tarekat Syattariyah. Menurut *tuanku* tarekat Syattariyah, banyak prinsip dan kebiasaan PKS yang kurang sesuai dengan tarekat Syattariyah. Antaranya adalah kebiasaan amalan tradisi berjanggut dan memakai kaki celana yang tergantung. Walaupun tradisi amalan ini dianggap baik, namun bagi *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah merupakan hal yang tidak lazim. Tambahan lagi, apabila *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung dengan PKS, juga akan menyebabkan hilangnya kepercayaan jemaah tarekat Syattariyah kepada *tuanku* tarekat Syattariyah, karena dianggap “luntarnya” pendidikan tarekatnya oleh pertimbangan politik. Berdasarkan semua pertimbangan ini jugalah seperti halnya boleh dikatakan hampir tidak ada *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah yang bergabung dengan PKS.

³⁰ Anak Haji Muhammad Wali, khalifah utama tarekat Naqshabandiyah di Aceh.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tidak dipilihnya partai Islam seperti PPP dan PKS oleh *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai basis partisipasi politik disebabkan oleh karena adanya perbedaan paham di antara modernis Islam dengan tradisional Islam. Partai Islam menurut *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai partai yang lebih cenderung dikuasai oleh modernis Islam. Modernis Islam ini bagi mereka merupakan kelompok yang sering menghujat ⁹amaliah mereka sebagai kaum tradisional Islam. Antara ⁹amaliah tradisional Islam yang sering dihujat dan dicemooh oleh modernis Islam adalah: tradisi *qunut*, Sembahyang dengan membaca *usalli*, tradisi “*bakajian*” (kenduri kematian), dan lain sebagainya.

Modernis Islam juga sering menganggap amalan dan paham tarekat Syattariyah sebagai “*heretic* (menyimpang) dan penuh *bid'ah* (amalan yang dibuat-buat tanpa dalil *nash* yang bersifat *qath'iy*).” Hujatan ini misalnya terlihat dari penolakan kaum modernis Islam terhadap amalan *bershafar* ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, penggunaan metode *ru'ayah* dalam menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, kenduri setelah kematian, *badikia* (pembacaan *al-Syarafal al-Anam*) dalam memperingati *Maulid Nabi*, khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab, dan berbagai prinsip dan amalan lainnya.

Mengenai hujatan modernis Islam terhadap prinsip dan amalan tradisional Islam ini, telah dibenarkan sendiri oleh Ismet Ismail *Tuanku Mudo*³¹ (*NU online*, 14 November 2008). Ia mengatakan bahwa dirinya pernah menerima SMS yang isinya menggugat amalan dan tradisi kaum tarekat Syattariyah. Antara amalan yang digugat tersebut adalah ziarah ke kuburan ulama. Ziarah kubur tersebut diberikan cap negatif sebagai perbuatan *syirik*, karena dianggap menyembah kuburan ulama tersebut. Padahal menurut paham kaum tarekat Syattariyah, ziarah kubur merupakan salah satu bentuk penghormatan dan memuliakan para ulama yang *senior*. Hanya saja disebabkan oleh karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka hanya boleh menziarahi kuburannya saja.

Oleh karena *tuanku* tarekat Syattariyah ingin menyelamatkan amalan dan tradisi yang telah mereka pegang teguh selama ini, maka mereka memandang perlu untuk menjaga jarak dan tidak mendekati kepada partai Islam, sehingga mereka tidak memilih partai Islam sebagai basis partisipasi politik. Apabila *tuanku* tarekat Syattariyah memaksakan diri untuk bergabung dengan partai Islam, maka mereka merasa khawatir kurang dihargai dan kurang mendapatkan tempat

³¹ Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jema'ah *Syathariyah* Sumatera Barat -Riau-Jambi dan Bengkulu. Pernah menjabat sebagai ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat selama dua periode (1999 – 2004, dan 2004-2009), dari Partai Golkar.

dalam partai Islam tersebut. Sehingga dengan demikian dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan dalam partai Islam tersebut.

2.2 Lebih Selamat dan Dihargai dalam Partai Nasionalis

Informan menyatakan bahwa penyebab *tuanku* tarekat Syattariyah lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik kepartaian adalah karena mereka merasa lebih selamat dan dihargai dalam partai nasionalis. Keputusan *tuanku* tarekat Syattariyah yang lebih menyebelahi partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politiknya disebabkan oleh karena merasa lebih selamat dan lebih mendapat penghargaan dalam partai nasionalis. *Tuanku* tarekat Syattariyah merasa lebih baik bergabung dengan partai bukan Islam (nasionalis) akan tetapi mau memahami dan menghormati prinsip serta amalan kaum tarekat Syattariyah, dari bergabung dengan partai Islam yang cenderung kurang mau memahami dan menghormati prinsip serta amalan mereka.

Untuk menggambarkan sikap mereka ini, dalam berbagai forum penyampaian ceramah, *tuanku* tarekat Syattariyah sering mengungkapkannya melalui ungkapan: "lebih baik berkawan dengan orang lain yang tidak memiliki ikatan tali persaudaraan dengan kita, namun dia memelihara kita, dari berkawan dengan orang dari kalangan sendiri, akan tetapi ia tidak memelihara kita." Dalam kalimat lain juga mereka tegaskan: "lebih baik mendekati lawan (partai nasionalis) yang tidak akan mengganggu kita, dari mendekati kawan (partai Islam) yang akan mengganggu kita. Tidak ada gunanya mendekati partai yang mengatasnamakan Islam, karena mereka selalu menghantam dan mencerca amaliah dan keyakinan kita." Makna ungkapan di atas dalam konteks kehidupan politik praktis adalah: lebih baik bergabung dengan partai yang tidak berhaluan Islam, akan tetapi menjaga dan menghormati nilai-nilai dan *amaliah* tarekat Syattariyah, dari pada bergabung dengan partai yang memiliki ideologi dan mengatasnamakan Islam, akan tetapi tidak menghormati dan menjaga nilai-nilai dan *amaliah* tarekat Syattariyah.

Partai nasionalis dianggap oleh *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai partai yang netral dan memberikan kesempatan yang sama terhadap segala macam agama dan paham, karena partai nasionalis tidak diasaskan kepada agama dan aliran tertentu. Dalam partai nasionalis juga ada kebebasan, dan tidak ada saling mencerca prinsip dan keyakinan amalan masing-masing. Dengan demikian, partai nasionalis tidak pernah mengganggu dan mempermasalahkan amalan tarekat Syattariyah, sehingga *tuanku* tarekat Syattariyah memiliki kedudukan dan kesempatan

yang lebih luas. Oleh karena itulah *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung bergabung dengan partai nasionalis, karena merasa lebih selamat, lebih terlindungi, dan senang berada di dalamnya.

Pertimbangan “untuk menjaga keberlangsungan *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional tarekat Syattariyah” merupakan prinsip utama yang selalu dipegang erat oleh *tuanku* tarekat Syattariyah dalam melakukan partisipasi dalam partai politik. Mereka akan bergabung dengan partai politik apapun, asalkan partai politik tersebut memiliki komitmen untuk memelihara *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional mereka. Pada masa orde baru, bergabungnya *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah mendukung partai Golkar juga disebabkan oleh pertimbangan ini. Partai Golkar yang berideologi nasionalis dianggap oleh *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai partai politik yang paling cocok untuk dijadikan sebagai saluran aspirasi politik, karena Partai Golkar tidak pernah mengganggu *amaliah* dan nilai-nilai tradisional tarekat Syattariyah.

2.3 Pragmatik dan Oportunistik Politik

Data penelitian juga menunjukkan bahwa kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah yang lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik juga disebabkan oleh karena pertimbangan pragmatik dan oportunistik. Kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah memilih bergabung kepada partai nasionalis tidak semata mata karena perbedaan paham dan *amalan* di antara modernis Islam dengan tradisional Islam, akan tetapi juga disebabkan oleh karena adanya perilaku pragmatik dan oportunistik segelintir *tuanku* tarekat Syattariyah dalam melakukan partisipasi politik kepartaian. Dalam memilih partai basis partisipasi politik, tergantung kepada peluang dan kesempatan, serta pendekatan yang dilakukan partai politik terhadap mereka. Partai Islam atau bukan partai Islam tidak menjadi pertimbangan dalam memilih partai basis partisipasi politik.

Kemampuan partai politik untuk mendekati seseorang *tuanku* juga memainkan peranan yang cukup menentukan bergabung atau tidaknya seorang *tuanku* ke dalam partai politik. Apabila satu partai politik merupakan yang yang pertama kali mendekati *tuanku* dibandingkan partai lain, maka diyakini *tuanku* akan bergabung dengan partai tersebut. Selain dari itu, *tuanku* tarekat Syattariyah melakukan perhitungan untung dan rugi dalam bergabung dengan partai politik. Apabila dipandang ada keuntungan yang akan diperoleh ketika bergabung dengan sebuah partai politik, maka mereka akan memberikan dukungan dan bergabung dengan partai politik tersebut.

Sedangkan jika dipandang tidak ada keuntungan yang akan diperoleh, maka mereka akan menjauh.

Pada hakikatnya *tuanku* tarekat Syattariyah juga tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pertimbangan material (uang) dan kekuasaan itu sendiri dalam memilih partai basis partisipasi politiknya. Terdapat indikasi bahwa mereka lebih cenderung memilih bergabung dengan partai nasionalis disebabkan adanya anggapan bahwa partai nasionalis memiliki uang yang cukup dibandingkan partai Islam. Jadi dengan bergabung dengan partai nasionalis, mereka berharap akan dapat memperoleh keuntungan, terutama bantuan keuangan untuk pondok pesantren mereka. Hal ini dapat dimaklumi karena para *tuanku* tersebut tidak menerima gaji dari pihak mana pun, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan keuangan yang jelas. Sedangkan secara rasionalnya mereka sangat memerlukan uang yang tidak sedikit untuk pembiayaan pembangunan pondok pesantren, dan pembiayaan pelaksanaan proses pengajarannya. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa *tuanku* tarekat Syattariyah secara rasional telah menggunakan pertimbangan ekonomi dalam memilih partai basis partisipasi politiknya.

Kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung dengan partai nasionalis juga dapat dikatakan sebagai keputusan politik berdasarkan kepentingan politik sesaat, tidak disebabkan oleh karena faktor ideologi dan rencana jangka panjang. Hal ini terjadi karena kurang memadainya pemahaman konseptual sebagian kalangan *tuanku* tarekat Syattariyah tentang politik dan politik kepartaian. Oleh karena itu sepertinya dipandang perlu untuk melakukan program penguatan ideologi dan pemahaman konseptual mengenai politik dan politik kepartaian bagi para *tuanku* tarekat Syattariyah.

Perilaku politik oportunistik dan pragmatik *tuanku* tarekat Syattariyah dalam partisipasi politiknya juga menunjukkan bahwa mereka masih belum banyak berfikir dalam konteks yang luas untuk kepentingan umat Islam dan jemaah tarekat Syattariyah khususnya. Demi tujuan dan kepentingan politik, terkadang *tuanku* tarekat Syattariyah memanfaatkan kultus ahli jemaah tarekat dan masyarakat terhadap dirinya secara sedemikian rupa. *Tuanku* sebagai elit tarekat selalu melakukan *bargaining* dengan partai politik dan calon dalam pemilu, dengan berani mengklaim dan menjanjikan suara karena mengaku memiliki sekian ribu jemaah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tuanku* sebagai elit tarekat Syattariyah telah “memanfaatkan” jemaah tarekat Syattariyah. Dengan adanya perilaku politik yang bersifat pragmatik dan oportunistik sebagian *tuanku* tarekat Syattariyah dalam partisipasi politiknya, pada akhirnya telah

mengindikasikan tidak ada lagi “*maziyah*” (perbedaan) di antara *tuanku* dengan orang awam ketika melakukan partisipasi politik kepartaian.

F. ANALISIS DATA

1. Tradisionalis Islam Versus Modernis Islam

Salah satu penyebab *tuanku* tarekat Syattariyah lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik adalah karena adanya perbedaan prinsip dan paham di antara tradisionalis Islam dengan modernis Islam. Dalam perspektif *tuanku* tarekat Syattariyah, partai Islam seperti PPP dan PKS misalnya, merupakan partai yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki paham modernis Islam, yang cenderung kurang mengakomodir dan menghargai paham tradisionalis Islam seperti tarekat Syattariyah. Apabila bergabung dengan partai ini, maka para *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah akan merasa kurang mendapat penghargaan sebagaimana seharusnya, karena memiliki paham keagamaan dan *‘amaliah* yang berbeda dengan kaum modernis Islam dalam partai Islam tersebut.

Dengan adanya perbedaan amalan dan paham mengenai Islam ini, maka penghargaan terhadap *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional tarekat Syattariyah tidak akan mendapat tempat, sehingga akan terabaikan dan dikucilkan oleh kaum modernis Islam di dalam partai Islam. Keadaan ini semakin bertambah buruk dengan kurangnya pendekatan partai Islam tersebut kepada *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah. Disebabkan oleh karena hal inilah makanya sangat jarang sekali ada *tuanku* tarekat Syattariyah yang bergabung dengan partai Islam. Kalaupun ada *tuanku* yang memasuki partai Islam, maka itu dianggap sudah tidak lagi karena memakai pertimbangan *‘amaliah* dan kepentingan tarekat Syattariyah. Tambahan lagi, apabila *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung dengan partai Islam, juga akan menimbulkan dampak hilangnya kepercayaan jemaah tarekat Syattariyah kepada *tuanku* tarekat Syattariyah, karena dianggap telah “lunturnya” pendidikan tarekat *tuanku* tersebut oleh karena pertimbangan politik.

Keberatan *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung dengan partai Islam yang dianggap dikuasai oleh modernis Islam menunjukkan indikasi masih kurang harmoninya hubungan pemahaman diantara tradisionalis Islam dengan modernis Islam. Walau bagaimanapun, perbedaan paham yang terjadi di antara modernis Islam dengan tradisionalis Islam sebagai dialektika dalam memahami Islam, nampaknya masih kekal di tengah-tengah masyarakat muslim

di Padang Pariaman. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, memang dikenal adanya perbedaan yang cukup tajam di antara dua kelompok ini. Kelompok tradisional Islam biasanya diwakili oleh Nahdatul Ulama (NU), sedangkan modernis Islam oleh Muhammadiyah (Turmudi, 2004: 275).

Tradisional Islam merupakan kelompok yang biasanya mengaku sebagai pengikut salah satu mazhab dalam Islam, sedangkan modernis Islam mendasarkan amalan keislamannya kepada penalaran. Tradisional Islam sering menghubungkan amalan keislamannya dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Tradisi tradisional Islam yang mengikuti salah satu mazhab dalam Islam dan menggunakan *ijma'* ulama sebagai salah satu sumber hukum membuat mereka secara berterusan merujuk kepada karya-karya ulama salaf dalam mengambil keputusan hukum (*istinbat*).

Modernis Islam tidak mengikatkan diri kepada salah satu dari mazhab tersebut. Selain itu, tradisional Islam juga merujuk *al-Qur'an*, *al-Hadith*, *Ijma'*, *Qiyas*, sebagai sumber dalam mengamalkan Islam. Sedangkan modernis Islam hanya merujuk kepada *al-Qur'an* dan *al-Hadith* saja dalam menetapkan sesebuah keputusan hukum, tanpa harus merujuk kepada sama ada karya-karya ulama *salaf* (*tradisional*) ataupun *khalaf* (*moderen*) untuk menjustifikasikan keputusan hukum yang mereka buat (Turmudi, 2004: 275-276). Modernis Islam pada umumnya juga ditandai oleh upaya-upaya mereka untuk mengubah realiti sosial umat Islam dalam pengamalan keagamaan. Pengamalan ajaran Islam sekarang (dalam pandangan modernis Islam) bersifat tidak ideal dan tidak betul secara agama. Oleh karena itu diperlukan gerakan sosial politik untuk mengubahnya. Di sisi lain, tradisional Islam selalu mencoba untuk mengkoordinasikan, memelihara, bahkan mengembangkan keyakinan, amalan, dan budaya keagamaan yang sedia ada. Sikap ini mereka ini berpedoman kepada kaidah: *al-muhafazatu 'ala al-qadimi as-salih, wa al-akhzu bi al-jadidi wa al-aslah*. Maksudnya: memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik (Turmudi, 2004: 277-278).

Perbedaan doktrin di antara modernis Islam dan tradisional Islam ini pada dasarnya tidak menyinggung persoalan yang bersifat prinsip dan *qath'i* (seperti *'aqidah*), akan tetapi lebih kepada bahagian yang bersifat *furu'* (*cabang*), seperti penafsiran dalam *fiqh*. Dalam konteks perbedaan di antara tradisional Islam dengan modernis Islam ini, Turmudi (2004: 278) berpendapat: "meskipun perbedaan di antara tradisional Islam dengan modernis Islam hanya terjadi pada aspek-aspek penerapan penafsiran masalah *fiqh*, namun perbedaan tersebut

dizahirkan melalui pengamalan Islam dalam kehidupan kasuseharian, sehingga mempengaruhi pandangan dunia serta prilaku sosial mereka.

Perbedaan di antara mereka berasal dari perbedaan dalam menafsirkan konsep Islam yang sangat penting dan menjadi asas kebudayaan dan amalan keagamaan umat Islam. Konsep tersebut berkaitan dengan pandangan tentang amalan keagamaan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan generasi awal sahabatnya. Amalan-amalan tersebut dikonseptualisasikan ke dalam konsep *bid'ah* (Turmudi, 2004: 278-279). Modernis Islam mengkonseptualisasikan *bid'ah* ke dalam pengertian "*hitam putih*". Mereka berprinsip bahwa mana-mana amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad akan dianggap sebagai *bid'ah*. Pemahaman ini muncul karena didasarkan kepada doktrin Islam "setiap hal yang dibuat-buat (baharu) adalah sesat, dan setiap kasusesatan membawa padah kepada neraka." Sedangkan pada sisi lain, tradisional Islam tidak terlalu ketat dan "*hitam putih*" dalam memahami *bid'ah*. Mereka membagi *bid'ah* ke dalam dua jenis, yaitu : *bid'ah hasanah* (*bid'ah* yang baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (*bid'ah* yang buruk). Perbedaan dalam penafsiran ini pada asasnya disebabkan oleh perbedaan sumber-sumber yang mereka gunakan, dan cara-cara mereka memahami norma-norma yang harus dibina dalam Islam (Turmudi, 2004: 279).

Berdasarkan huraian di atas, maka dapat dimengerti apabila kelompok modernis Islam dianggap oleh *tuanku* dan kaum tarekat Syattariyah di Padang Pariaman sebagai kelompok yang akan mengancam kepercayaan dan amalan tarekat Syattariyah. Secara faktanya, kaum modernis Islam di Padang Pariaman memang sering menganggap amalan dan paham keagamaan tarekat Syattariyah sebagai amalan yang bersifat *heretic* (menyimpang) dan penuh *bid'ah* (amalan-amalan yang dibuat-buat tanpa adanya dalil dari *nas* yang bersifat *qath'iy*). Hujatan ini misalnya terlihat dari penolakan kaum modernis Islam terhadap amalan *bersafar* ke makam Syeikh Burhanuddin di Ulakan, penggunaan kaedah *ru'cyah* dalam menentukan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, kenduri setelah kematian, *badikia* (pembacaan al-*Syarafal al-Anam*) dalam memperingati *maulid nabi*, khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab, dan berbagai prinsip serta amalan lainnya. Sehingga bukan hal yang aneh, apabila dalam terdengar istilah yang bernada "melecehkan" kaum tarekat Syattariyah seperti : kaum kuno, kaum *badikia*, kaum menuju hari, dan sebagainya.

Dalam kasus partisipasi politik *tuanku* tarekat Syattariyah di Padang Pariaman ini, perbedaan paham dalam memahami doktrin Islam di antara tradisional Islam dengan modernis Islam tidak hanya menimbulkan dampak terhadap aspek keagamaan saja, akan tetapi telah

meluas sedemikian rupa ke dalam aspek politik, sehingga mempengaruhi *tuanku* tarekat Syattariyah dalam menentukan basis partai politik partisipasi politik mereka. *Tuanku* tarekat Syattariyah terlihat cenderung menghindari dan merasa “kurang nyaman” apabila bergabung ke dalam partai Islam, karena mereka memahami partai Islam dikuasai oleh modernis Islam. Pertimbangan “untuk menjaga keberlangsungan *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional tarekat Syattariyah” merupakan prinsip utama yang selalu dipegang oleh *tuanku* tarekat Syattariyah dalam melakukan partisipasi dalam partai politik. Mereka akan bergabung dengan partai politik, asalkan partai politik tersebut memiliki komitmen untuk memelihara *‘amaliah* dan nilai-nilai tradisional mereka.

2. Desakralisasi Politik Ulama Tarekat Menuju Pragmatis Religius

Fakta partisipasi politik *tuanku* tarekat Syattariyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman ini menunjukkan bahwa ulama tidak memisahkan diri dari aktifitas politik. Hal ini tampaknya sesuai dengan pendapat Gibb dan Bowen, yang telah membantah pandangan bahwa ulama bersifat *non* politik, kelompok sosial yang homogen yang tidak memiliki *interest* terhadap politik (Azra, 1999: 170). Ini berarti juga sesuai dan mendukung pendapat Horikoshi (1987: 1) yang mengatakan bahwa ulama tradisional “tidak hanya memainkan peranan dalam kehidupan agama saja, akan tetapi juga turut serta berkecimpung berbagai aktifitas sosial dan politik, sehingga kemudiannya muncul sebagai pemimpin sosial dan politik”.

Dengan demikian, fakta partisipasi politik *tuanku* tarekat Syattariyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman ini sepertinya kurang sesuai dengan pendapat yang menyatakan kaum tarekat cenderung untuk menjauhkan diri dari urusan politik, hanya berorientasi kepada urusan *ukhrawi* dan aspek asketis (*zuhud*) sebagai usaha mendekati diri kepada Tuhan. Sehingga tarekat kononnya lazim menjauhkan diri dari masyarakat (*khalwat*, *‘uzlah*), sebagaimana definisi yang diberikan terhadap kelompok tarekat selama ini.

Perkembangan tarekat yang dianggap sebagai gejala depolitisasi (sebagai pelarian dari tanggung jawab sosial dan politik) dan sangat menghindari sikap politik (Bruinessen, 1992: 3-14), sepertinya kurang sesuai dengan kenyataan empirik yang terjadi. Berdasarkan pendapat Sunyoto (dalam Sujuthi, 2001), adanya partisipasi *tuanku* tarekat Syattariyah dalam partai nasionalis menunjukkan: meskipun tarekat merupakan aktifitas pembersihan diri dan lebih mementingkan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, namun ulama tarekat masih peduli dengan isu-isu politik. Ini juga menunjukkan bahwa anggapan terhadap ulama tarekat yang diidentikan memfokuskan diri

menekuni dunia spiritual dan kurang bersentuhan dengan dunia politik yang dianggap identik dengan “kekotoran” juga kurang sesuai dengan temuan ini (Mulyati dalam Soprianti 2009).

Kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai basis partisipasi politik, tampaknya cenderung kurang sesuai dengan pemahaman “politik aliran” dalam perilaku politik Indonesia. Apabila mengikuti kategori *abangan* dan *santri* yang dikemukakan Geertz (LSI, 2007a: 17; Mujani, 2004), maka nampaknya *tuanku* tarekat Syattariyah yang termasuk ke dalam kategori *santri* terlihat tidak cenderung untuk bergabung dengan partai Islam, malahan sebaliknya mereka lebih memilih bergabung dengan partai nasionalis, yang seharusnya merupakan kecenderungan individu bukan Islam, dan muslim *abangan*.

Hasil penelitian ini terlihat lebih cenderung memiliki persamaan dengan kajian Liddle dan Mujani (2000), yang menyatakan bahwa muslim “santri” tidak lagi mendukung partai-partai Islam, malahan sebaliknya mereka telah mendukung partai nasionalis. Dalam kajian ini, *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai muslim “santri” telah memiliki kecenderungan untuk tidak memilih partai Islam, melainkan lebih memilih partai nasionalis sebagai basis partisipasi politik. Dari lapan orang *tuanku* tarekat Syattariyah yang melakukan partisipasi politik kepartaian pada tingkat daerah Padang Pariaman, hanya terdapat satu orang *tuanku* yang bergabung dengan partai Islam, yaitu PBB. Sedangkan tujuh orang lagi telah bergabung dengan partai nasionalis. Dengan demikian, temuan kajian ini menunjukkan bahwa *tuanku* tarekat Syattariyah yang merupakan kaum *santri*, tidak memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan partai Islam. Malahan sebaliknya mereka lebih memilih partai nasionalis sebagai basis partisipasi politiknya.

Dengan demikian temuan kajian ini menunjukkan indikasi telah memudarnya politik aliran pada tingkat elit, yaitu pada tingkat *tuanku* tarekat Syattariyah yang menjadi pemimpin politik dalam partisipasi politik pada partai nasionalis. Hal ini nampak melengkapi temuan Liddle dan Mujani (2000), yang telah terlebih dahulu menemukan memudarnya politik aliran terjadi pada tingkat *massa*, bukannya pada tingkat pemimpin politik (*elite*).

Pendapat Pababbari (2010: 594) yang menyatakan bahwa kaum tarekat mulai memahami politik dalam perspektif yang “rasional” untuk kepentingan sosial dan ekonomi, sehingga dalam menentukan pilihan dan afiliasi partai politiknya telah menjadi pragmatik-rasional, sepertinya sesuai dengan temuan kajian ini. Secara pragmatiknya, *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung tergantung kepada peluang dan kesempatan, serta pendekatan yang dilakukan partai politik terhadap mereka dalam memilih partai basis partisipasi politik.

Tuanku tarekat Syattariyah melakukan perhitungan untung dan rugi dalam bergabung dengan partai. Apabila dipandang ada keuntungan yang akan diperoleh ketika bergabung dengan sesuatu partai politik, maka mereka akan memberikan dukungan dan bergabung dengan partai politik tersebut. Sedangkan jika dipandang tidak ada keuntungan yang akan diperoleh dalam sesuatu partai politik, maka mereka akan menjauh. Pada hakikatnya *tuanku* tarekat Syattariyah juga tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pertimbangan material (uang) dan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, partai Islam atau bukan partai Islam bukan lagi menjadi pertimbangan yang diambil kira dalam memilih partai basis partisipasi politik.

Perilaku politik pragmatik *tuanku* tarekat Syattariyah bergabung dengan partai nasionalis, sepertinya disebabkan oleh pertimbangan yang sangat dasar, bahwa partai politik hanyalah alat yang digunakan sebagai wadah perjuangan, bukan tujuan perjuangan itu sendiri. Dengan demikian, *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai muslim santri tidak harus memilih partai Islam sebagai basis partisipasi politik. Perilaku politik *tuanku* tarekat Syattariyah yang lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai Islam sebagai partisipasi politiknya, mengirimkan suatu “pesan” bahwa organisasi apapun pun boleh digunakan sebagai wadah dalam mencapai tujuan dan kepentingan umat Islam (Sujuthi, 2001: 71). Oleh karena itu dalam pengertian ini, tidak ada kewajiban moral bagi *tuanku* tarekat Syattariyah sebagai seorang muslim untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Mereka tidak merasa ragu untuk bergabung dengan partai nasionalis, suatu pilihan politik yang pada masa dahulu dianggap memiliki konsekuensi keagamaan (Turmudi, 2004: 241-242).

Sedangkan secara rasionalnya, partisipasi *tuanku* tarekat Syattariyah secara langsung dalam partai nasionalis terlihat didasari oleh pemikiran rasional untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Secara sosial misalnya, partisipasi politik mereka didasari oleh pemikiran rasional “untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan, dan memajukan, serta memelihara ^oamaliah dan nilai-nilai tradisional, serta mengangkat “marwah” dan “status sosial” *tuanku* dan kaum tarekat Syattariyah. Dengan banyaknya *tuanku* tarekat Syattariyah yang melakukan partisipasi politik dalam politik kepartaian (apalagi bila berhasil menjadi anggota DPRD), merupakan suatu pembuktian kepada masyarakat, bahwa *tuanku* tarekat Syattariyah tidak hanya pandai berdakwah melulu (mendoa, berceramah), akan tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerjuni aktifitas dalam politik praktis.

Tuanku tarekat Syattariyah mencoba bersikap rasional dalam melakukan partisipasi politik, tidak harus memaksakan diri bergabung kepada partai Islam seperti PPP dan PKS

misalnya. Mereka merasa lebih baik bergabung dengan partai nasionalis, karena partai nasionalis mau memahami dan menghormati prinsip serta amalan mereka, dari pada bergabung dengan partai Islam yang cenderung agak kurang mau memahami dan menghormati prinsip serta amalan tarekat Syattariyah. Rasionalnya mereka misalnya dapat dilihat dari ungkapan kalimat “lebih baik berkawan dengan orang lain yang tidak memiliki ikatan tali persaudaraan dengan kita, namun memelihara kita, dari pada berkawan dengan kalangan sendiri, akan tetapi tidak memelihara kita”. Dalam kalimat lain juga mereka tegaskan: “lebih baik mendekat kepada lawan (partai nasionalis) yang tidak akan mengganggu kita, dari mendekat kepada kawan (partai Islam) yang akan mengganggu kita. Tidak ada gunanya mendekat kepada partai yang mengatasnamakan Islam, karena mereka selalu menghantam dan mencerca amaliah dan keyakinan kita.” Makna ungkapan di atas dalam konteks kehidupan politik praktis adalah: lebih baik bergabung dengan partai yang tidak berhaluan Islam, akan tetapi menjaga dan menghormati nilai-nilai dan *amaliah* tarekat Syattariyah, dari pada bergabung dengan partai yang memiliki ideologi dan mengatasnamakan Islam, akan tetapi tidak menghormati dan menjaga nilai-nilai dan *amaliah* tarekat Syattariyah.

Melalui ungkapan tersebut, *tuanku* tarekat Syattariyah berusaha memberikan justifikasi dan legitimasi terhadap tindakan politiknya ketika bergabung ke partai nasionalis dengan menggunakan metafora tertentu. Dalam konteks ini, sepertinya memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Kiai Musta'in Ramli ketika bergabung dengan partai Golkar, yang mengungkapkannya melalui kalimat metafora “bermimpi bermain layang-layang bergambar bumi yang dikelilingi oleh sembilan bintang (simbol NU) dan pohon beringin (lambang partai Golkar), yang melindungi pesantrennya di Jombang” (Turmudi, 2004:133-134).

Selain dari itu, adanya *tuanku* tarekat Syattariyah yang melakukan partisipasi politik kepartaian merupakan suatu kebanggaan (*prestise*) sosial bagi *tuanku* dan jemaah tarekat Syattariyah. Secara sosial hal ini diharapkan mampu mengurangi cap negatif dan hujatan sebagai kaum “Islam kuno”, *heretic*, identik dengan amalan *bid'ah* dan sebagainya. Selain itu juga karena kepentingan untuk menambah wawasan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta untuk menambah pergaulan, karena selama ini cenderung bergaul dengan kalangan dalam pondok pesantren *Salafiyah* saja.

Secara kepentingan ekonomi, partisipasi politik *tuanku* tarekat Syattariyah secara langsung dalam partai nasionalis dilatarbelakangi oleh pemikiran rasional untuk memperjuangkan kepentingan *tuanku* dan “*orang surau*” yang selama ini cenderung “agak

diabaikan” dalam kebijakan pemerintah mengenai program-program dan alokasi keuangan bagi pondok pesantren *Salafiyah*. Hal ini berangkat dari “agak terabaikannya” pondok pesantren *Salafiyah* dalam kebijakan pemberian dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Padang Pariaman bidang pendidikan tahun 2006. DAK tersebut tidak satupun memberikan alokasi keuangan dan pembiayaan untuk pondok pesantren *Salafiyah* (Armaid Tanjung, 2007: 2). Padahal, di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sekitar 36 pondok pesantren *Salafiyah* (data 2005). Setelah *Tuanku* tarekat Syattariyah mengadakan demonstrasi, barulah kemudian kebijakan DAK tersebut dirubah. Beberapa pondok pesantren *Salafiyah* kemudian mendapatkan bantuan keuangan tersebut (Armaid Tanjung, 2007: 38). Oleh karena itu mereka harus menceburkan diri dalam aktifitas politik, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi *tuanku* tarekat Syattariyah dan pondok pesantren *Salafiyah*.

Pilihan politik *tuanku* tarekat Syattariyah lebih cenderung memilih partai nasionalis sebagai basis partisipasi politik juga merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap penafsiran yang berbeda dalam Islam politik. *Tuanku* tarekat Syattariyah menegaskan sebuah pemahaman, bahwa aktifitas Islam politik tidak perlu terbatas ke dalam partai Islam saja. Aktifitas kepartaian dapat dilakukan dalam partai apapun, asalkan memungkinkan untuk pencapaian tujuan-tujuan Islam. Dalam hal ini, partai Islam hanyalah salah satu di antara partai politik yang dapat dijadikan sebagai alat memperjuangkan kepentingan umat Islam (Turmudi, 2004: 134-135).

Kecenderungan *tuanku* tarekat Syattariyah lebih memilih untuk bergabung dengan partai nasionalis dibandingkan partai Islam nampaknya merupakan indikasi telah berlakunya “desakralisasi politik” dalam perilaku politik *tuanku* tarekat Syattariyah di Padang Pariaman. Mujani (2004) mengartikan desakralisasi politik ini sebagai fenomena memudarnya peranan agama dan kelas sosial dalam kehidupan politik. Namun sungguhpun demikian, indikasi desakralisasi politik pada kalangan *tuanku* tarekat Syattariyah di Padang Pariaman ini adalah dalam konteks: tidak adanya suatu keharusan bagi diri mereka untuk bergabung dengan partai Islam ketika melakukan partisipasi politik. Dengan demikian, ini bermakna ketaatan *tuanku* tarekat Shattariyah dalam beragama mulai mereka pisahkan dengan pilihan politik ketika menentukan basis partisipasi politik kepartaian.

Adanya kecenderungan desakralisasi politik dalam perilaku politik *tuanku* tarekat Syattariyah di Padang Pariaman (partisipasi politik tidak harus dilakukan melalui partai Islam saja) pada dasarnya dapat dijadikan argumentasi untuk mengatakan bahwa *tuanku* tarekat

Syattariyah merupakan manusia yang bersifat “pragmatik religius” dalam perilaku politiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuntowijoyo (2007), yang mengatakan bahwa desakralisasi politik yang terjadi pada kalangan Islam politik telah menyebabkan mereka menjadi manusia “pragmatik religius” dalam perilaku politiknya. Dalam konteks ini, sebagai *antropo-teosentrisme*, *tuanku tarekat* Syattariyah mencoba untuk mengintegrasikan paham dan prinsip sekuler dengan religius, kepentingan manusia dengan “kepentingan” Tuhan, kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Mereka juga akan mengelola berbagai urusan sebagai urusan yang rasional dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sebagai manusia pragmatik religius, *tuanku tarekat* Syattariyah yang melakukan partisipasi politik dalam partai nasionalis terlihat telah “sedikit” menghilangkan dikotomi (pemisahan) paham sekuler dengan paham religius dalam politik kepartaian pada tingkat daerah di Padang Pariaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Chaidar, 2008. *Pemilu 1999: pertarungan ideologis partai partai Islam versus partai sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Antara Sumbar. 2009. Imam jamaah Syattariyyah berkhotbah sambil pegang tongkat. 21 September. <http://www.antara-sumbar.com/id/?sumbar=berita&d=2&id=47841> (15 Mei 2010).
- Armaiditanjung, Bagindo. 2007. *Tuanku menggugat*. Padang: Pustaka Artaz.
- Atjeh, Aboebakar. 1980. *Pengantar ilmu tarekat dan tasawuf (huraian tentang mistik)*. Ipoh Perak: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks berteologi di Indonesia, pengalaman Islam*. Jakarta: Penerbit Paramadina. Cet.1
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. Political Islam in Indonesia: present and future trajectory. Asian Survey Vol. 44. No. 5 (Sept-Oct 2004). 669-690, University California Press. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4128549>. Akses 11/10/2010.
- Bungin, Burhan. 2003. Teknik teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 83-105. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Bruinessen, Martin Van. 1992. *Tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akherat ? Majalah Pesantren* Vol. IX No.1 (3-14).
-1996. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan. Cet.4

- Chua, Yan Piaw. 2006. *Kaedah penyelidikan*. Buku 1. Malaysia: Mcgraw-Hill Sdn.Bhd.
- Creswell, John.W. 2003. *Desain penelitian, pendekatan kualitatif & kuantitatif*. Terj. Jakarta: KIK Press.
- Dobbin, Christian. 1974. Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century. *Modern Asian Studies*, Vol.8. No.3. hal. 326. <http://www.jstor.org/stable/311737>.
- Fathurrahman, Oman. 2004. Tarekat Syattariyyah memperkuat ajaran neosufisme. Dlm. Mulyati, Sri (pnyt), *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- 2003. Tarekat Syattariyyah di Dunia Melayu: kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah naskah di Sumatera Barat. Disertasi doktor ilmu pengetahuan budaya pada Program Studi Ilmu Susastra. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Harian Singgalang. 2009. Ulakan akan dibanjiri umat *basyafa*, berzikir, muliakan guru. 08 Februari.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan perubahan sosial*. Terj. Umar Basalim & Andi Muarly Sunrawa. Perhimpunan Pembangunan Pesantren (P3M): Jakarta. cet.1.
- Istadiyantha, 2006. Fungsi tarekat Syattariyyah: suatu telaah filologis, Kertas kerja Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Perspektif Pergaulan Antarbangsa (PIBSI) XXVIII, Anjuran IKIP PGRI Semarang, Semarang, 2 –4 Julai 2006.
- Kanto, Sanggar. 2003. Sampling, validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif, Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 51-63. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Kuntowijoyo, 2004. Menuju pragmatisme religius, *Kompas*, 7 Julai. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0407/07/opini/1129962.htm>
- Liddle, R.W dan Mujani, Syaiful. 2000. Politik aliran memudar, kepemimpinan nasional menentukan pilihan partai politik, *Kompas, Jumaat, 1 September*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/01/nasional/poli35.htm>
- Lembaga Ilmiah Metafisika dan Tasauf Islam (LIMTI), 1985. *Mutiara Al-Qur'an dalam: capita selecta tentang agama, metafisika, ilmu eksakta*. Jilid III. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Lingkar Survey Indonesia (LSI), 2007a. Partai politik dan peta studi perilaku pemilih di Indonesia, *Kajian Bulanan* Oktober.
- 2007b. Trend dukungan nilai Islamis versus nilai sekular di Indonesia. www.lsi.or.id. 05 Oktober. <http://www.lsi.or.id/riset/310/trend-dukkungan-nilai-islam-is-versus-nilai-sekular>.

- Mack, Natasha., Woodsong, Cynthia., Macqueen, Kathleen M., Guest, Greg & Namey, Emily. 2005. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: Family Health International.
- Makmur, Hendra. 2005. Pilkada Kabupaten Padang Pariaman antara lapau surau dan laga-laga. *Media Indonesia*. 08 April.
- Malalak, Yurisman. 2009. Syattariyyah: lebaran, Senin atau Selasa. *Padang Ekspres*, 15 September.
- Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan abangan di Jawa*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Mujani, Saiful. 2004. Penjelasan aliran dan kelas sosial sudah tidak memadai. Wawancara oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia. [www. Islamlib.com](http://islamlib.com). 26 September. <http://islamlib.com/id/artikel/penjelasan-aliran-dan-kelas-sosial-sudah-tidak-memadai/>
- 2007. *Muslim demokrat Islam, Budaya dan demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, Saiful dan Liddle, R.W. 2010. *Personalities, partaies, and voters*. *Journal of Democracy*, Vol. 21, No. 2 (35-49).
- Mulyati, Sri (pnyt). 2004. *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- NU Online*, 2008. Jamaah Syatariyah diminta bersatu hadapi serangan anti Aswaja, 14 November. http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14992
- Oxford Dictionaries, 2010. Oxford University Press. Kamus online, http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0987310. 20 Desember 2010
- Pababbari, Musafir. 2010. Patronase Agama dalam kehidupan politik lokal (melemahnya nilai-nilai tradisional agama masyarakat). Kertas Kerja, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke – 10*. Hal. 583 - 600, Anjuran Kementerian Agama Republik Indonesia. Banjarmasin, 1-4 Nopember.
- Pramono & Bahren, 2009. *Kepemimpinan Islam di kalangan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat Syattariyyah di Minangkabau*. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 7. No. 1 (91–108).
- Rahmat Tuanku Sulaiman. 2006. *Tradisi pengangkatan tuanku di pesantren*, *Harian Singgalang* 18 Juli.
- Romli, Lili, 2006. *Islam yes partai Islam no, sejarah perkembangan partai partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1
- Salim, Agus (Penyt). 2001. *Teori Dan paradigma penelitian sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

- Samad, Duski. 2002. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (syarak mendaki adat menurun)*, Jakarta: *The Minangkabau Foundation*.Cet.1
- Soparianti, Pera. 2009. *Benarkah ahli tariqot berpolitik ?* <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/artikel/540-benarkah-ahli-tariqot-berpolitik.html> (Khamis, 23 April 2009).
- Sujuthi, Mahmud. 2001. *Politik tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang, hubungan agama, negara dan masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- Tempo. 1980. Tarekat bukan Islam jama'ah. 19 Januari. Edisi 47/IX.
- Thohir, Ajid & Riyadi. Dedi Ahimsa. 2002. *Gerakan politik kaum tarekat, telaah historis gerakan politik antikolonialisme tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di pulau Jawa*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.
- Yatim, Syafriadi S. *et al* (ed). 2010. *Pemilu 2009 dalam angka, satu suara untuk masa depan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

Wawancara

- Abdul Qadir Jailani. 2011. *Triangulasi (cross check) partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 26 Februari*
- Ahmad Damanhuri *Tuanku* Mudo. 2010. *Triangulasi (cross check) partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara melalui layanan facebook (www.facebook.com), 13 Oktober*.
- Ahmad Zein *Tuanku* Sutan. 2010. *Triangulasi (cross check) partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 12 Jun*
- Ali Basyar *Tuanku* Sutan Sinaro. 2010. *Partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 9 Jun*.
- Amiruddin *Tuanku* Majolelo. 2011. *Partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 26 Februari*.
- Armaidid Tanjung, Bagindo. 2010. *Triangulasi (cross check) partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 3 September*.
- Azwar *Tuanku* Sidi. 2011. *Triangulasi (cross check) partisipasi politik Tuanku tarekat Shattariyyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 28 Februari*

- Nasir, Bilal. 2010. *Triangulasi (cross check)* partisipasi politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 7 Mei.
- Rahmadani *Tuanku* Sidi. 2011. *Triangulasi (cross check)* partisipasi politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 25 Februari
- Rahmat *Tuanku* Sulaiman. 2010. Partisipasi politik *tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 12 Mei.
- Ridwan, Muhamad. 2010. *Triangulasi (cross check)* Partisipasi Politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam Partai Nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat.Wawancara 13 Mei.
- Saamar *Tuanku* Sidi. 2011. Partisipasi politik *tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam Partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 27 Februari.
- Suhaili *Tuanku* Mudo.2011. Partisipasi politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 25 Februari.
- Syofyan Marzuki *Tuanku* Bandaro. 2011. *Triangulasi (cross check)* partisipasi politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 23 Februari.
- Zulhelmi *Tuanku* Sidi. 2010. Partisipasi politik *Tuanku* tarekat *Shattariyyah* dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Wawancara 2 September